

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian akhir dari tulisan ini dirumuskan beberapa kesimpulan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi, baik berkenaan dengan upaya yang dapat ditempuh bagi pengembangan masyarakat desa di ZILS dan pengembangan masyarakat desa pada umumnya, maupun untuk pelaksanaan penelitian lebih lanjut.

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan program CD perusahaan industri besar di ZILS khususnya pengembangan masyarakat desa model akan mendatangkan hasil lebih maksimal, jika program-program CD dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip-prinsip pembangunan partisipatoris. Pengaktualisasian prinsip-prinsip pembangunan partisipatoris akan berhasil, jika PLS difungsikan sebagai bagian penting dari kegiatan CD dan juga sebagai pendekatan dasar CD. Mengingat, dalam hampir keseluruhan aktivitas CD yang ditujukan untuk mengadakan perubahan harus didahului oleh proses penyadaran dan pembentukan sikap dan prilaku positif individu dan kelompok terhadap perubahan, maka keberadaan PLS dalam proses dimaksud sangat penting. Semakin besar kesadaran, sikap dan prilaku positif diperlukan oleh program perubahan,

semakin besar peran dan fungsi PLS dapat dimainkan, serta semakin efektif program dalam mencapai tujuan perubahan.

Hasil penelitian menunjukkan:

1. Penyelenggaraan program CD oleh perusahaan industri besar di ZILS dilandasi oleh pertimbangan ekonomi, politik dan moral. Landasan ekonomi berkenaan dengan upaya menumbuhkan sense of belonging masyarakat sekitar terhadap perusahaan, dalam menjaga eksistensi perusahaan sebagai unit ekonomi yang berorientasi produk dan profit. Landasan politis berkenaan dengan perluasan eksistensi perusahaan sebagai stabilisator dan mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, regional dan pedesaan. Landasan moral berkenaan dengan keprihatinan dan tanggungjawab moral perusahaan terhadap kondisi kehidupan masyarakat di sekitarnya, sehingga secara langsung melibatkan diri dalam upaya pemecahan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan dialami masyarakat sekitar, baik sebagai akibat dari proses industrialisasi, perkembangan iptek, maupun tuntutan kehidupan yang semakin global.
2. Program-program CD yang dilaksanakan mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilakukan secara bertahap, melalui penetapan prioritas garapan berdasarkan lini spasial, yang dimulai pada masyarakat terdekat. Tercakup bidang kepemimpinan dan struktur administrasi desa, pendidikan

dan keterampilan, sosial-budaya dan agama, kesehatan dan lingkungan hidup, mata pencaharian penduduk, dan sarana/prasarana.

3. Program-program CD dilaksanakan berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Berpegang pada prinsip "*mutual self-help*" -- "*to help people, help them-self*", dan berlandaskan konsep pembangunan terpadu. Namun dalam kenyataannya program CD murni belum terwujud secara utuh, melainkan masih dalam bentuk "*pseudo-community development*". Konsep pembangunan desa terpadu yang diharapkan teraktualisasi dalam pengembangan masyarakat desa model, baru terwujud dalam lingkup sangat terbatas, keterpaduan dalam makna kebersamaan masih dijumpai dalam slogan-slogan politis.
4. Strategi CD yang ditempuh adalah perpaduan antara pendekatan top-down dan bottom-up, yang di lingkungan perusahaan industri besar di ZILS lebih dikenal dengan "*pendekatan pasif-responsif*", yang juga diilustrasikan sebagai "*pendekatan mendorong mobil mogok*".
5. Upaya pengembangan masyarakat desa model diawali dengan penempatan agen di tengah-tengah masyarakat. Ia bersama masyarakat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan, merencanakan kegiatan dan melaksanakannya. Untuk menggalang keterlibatan masyarakat, ia mengadakan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat baik melalui jalur

formal maupun informal, seperti pendekatan warung kopi, meunasah, pemanfaatan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi dan kegiatan kepemudaan, pengajian di dayah, keterlibatan dalam kegiatan sosial desa dan sebagainya.

6. Intensitas dan kontinuitas pembinaan kegiatan relatif sangat kurang. Akibatnya efektivitas program dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik juga relatif rendah. Kegiatan pelatihan keterampilan bagi para pemuda putus sekolah dan para kader lainnya misalnya, belum mengacu kepada proses pembelajaran PLS khususnya proses pembelajaran orang dewasa. Keberadaan pusdiklat perusahaan sebagai unit PLS, lebih diperlakukan seperti sekolah perusahaan, baik dalam hal seleksi peserta, pengelompokan peserta, interaksi belajar yang diciptakan maupun evaluasi kegiatan. Keterkaitan antara program yang telah dan sedang dilaksanakan relatif kurang. Akibatnya, efektivitas pelatihan juga relatif rendah, terutama jika dihubungkan dengan proses difusi inovasi.
7. Mengenai dampak pelaksanaan program CD terungkap. Dalam hubungannya dengan upaya menumbuhkan sense of belonging masyarakat terhadap perusahaan, dapat dikatakan telah tercapai. Tidak adanya hambatan produksi perusahaan, yang bersumber dari masyarakat sekitar, merupakan bukti telah tumbuhnya sense of belonging masyarakat terhadap

perusahaan. Tingginya sense of belonging masyarakat juga tercermin pada terangkatnya gengsi masyarakat atas keberadaan proyek-proyek industri raksasa di lingkungannya, walau tidak lebih sebagai menara gading. Jadi upaya membangun benteng masyarakat bagi kepentingan perusahaan relatif sudah terwujud, yang secara ekonomi dapat diperhitungkan sebagai investasi perusahaan.

Dalam hubungannya dengan perwujudan stabilitas pembangunan, khususnya dalam hal pengadaan dana pembangunan, dalam suasana ekonomi negara dalam keadaan sulit ia telah menjadi pelopor utama pengadaan dana pembangunan negara, dalam situasi ini ia menjadi mitra kerja pemerintah yang paling handal. Namun jika dihubungkan dengan peningkatan koordinasi penyelenggara pembangunan masyarakat desa khususnya peningkatan koordinasi dan partisipasi bagi pelaksanaan program CD murni di desa-desa model, dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Fungsi koordinatif hanya terlaksana dalam lingkup sangat terbatas, perekomendasi kelayakan program.

Jika dihubungkan dengan upaya pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat di kawasan itu, terutama dalam mengangkat taraf hidup masyarakat lapisan bawah, maka kontribusi program CD relatif terbatas. Rembesan kemalahatan yang dihembuskan perusahaan, bagaikan tetesan

embun di tengah teriknya matahari. Tetesan kemaslahatan bahkan lebih mengarah kepada tempat atau pihak-pihak yang kurang membutuhkan. Lebih mengarah kepada proyek-proyek monumental yang mencerminkan gengsi dan promosi daripada program-program pembinaan kualitas sumberdaya manusia bagi keperluan pembangunan jangka panjang.

8. Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program CD khususnya di desa-desa model, baik berkenaan dengan perusahaan industri, masyarakat, pemerintah, maupun strategi kegiatan yang diterapkan.

Berkenaan dengan perusahaan industri; (1) belum adanya suatu pedoman operasional yang dapat dijadikan pegangan oleh semua unsur terkait; (2) kurangnya tenaga ahli yang terlibat dalam program CD, baik kualitas maupun kuantitas; (3) adanya keterbatasan manajerial perusahaan dalam pelaksanaan CD; (4) intensitas dan kontinuitas pembinaan yang dapat dilakukan perusahaan relatif sangat rendah; (5) program-program CD yang dilaksanakan lebih sebagai bagian dari kegiatan promosi untuk menumbuhkan sense of belonging.

Berkenaan dengan Pemerintah, misalnya: (1) adanya dualisme konsep pengembangan masyarakat desa binaan, yang ditempuh Pemda dan Perusahaan Industri. Akibatnya, dukungan Pemda terhadap upaya pengembangan masyarakat yang dilakukan perusahaan tidak maksimal, setengah

hati; (2) Ketidaksiapan Penda menyongsong industrialisasi, baik memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka, penyiapan tenaga kerja, merencanakan program-program pengembangan jangka pendek, menengah dan panjang terutama menyangkut pembinaan kualitas sumber daya manusia; (3) Penda lebih tertarik kepada proyek-proyek CD yang sifatnya monumental, atau kegiatan seremonial lainnya, lebih hanya untuk mempertaruhkan gengsi daripada proyek-proyek pembinaan sikap mental masyarakat bagi keperluan pembangunan jangka panjang; (4) belum berfungsinya Penda sebagai pengkoordinir kegiatan CD, sehingga keterpaduan dan keintegralan program dalam menjembatani berbagai kepentingan sangat kurang; (5) kualitas aparat kepemimpinan di tingkat desa rata-rata relatif rendah, sehingga untuk merencanakan dan melaksanakan program bersama masyarakat yang mengarah kepada pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi yang ada di desa juga sangat terbatas. Bahkan sering terjadi, perencanaan kegiatan hanya dilakukan oleh Keucik dan tokoh-tokoh masyarakat saja.

Berkenaan dengan masyarakat, misalnya: (1) adanya kesenjangan pemahaman tentang arti, misi dan tujuan dari program CD. Masyarakat cenderung memahami program CD sebagai upaya membagi-bagi rezeki dari perusahaan, sehingga rangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan

kepada masyarakat ditafsirkan sebagai bagian dari tugas dan kewajiban perusahaan. Akibatnya, gerak, langkah, dan tujuan serta cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan juga berbeda; (2) permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat semakin bertambah dengan pesat; (3) mentalitas membangun di kalangan masyarakat relatif rendah (seperti disiplin, etos kerja, kemandirian, keberanian menanggung resiko, inisiatif, kreativitas, dan kedinamisan relatif sangat kurang); (4) adanya kecenderungan terjadi pergeseran/perubahan nilai dan orientasi masyarakat ke arah materialistis dan konsumtif, seperti lebih tertarik kepada pekerjaan yang perolehan hasil spontan, lebih tertarik pada kegiatan monumental atau syiar, atau kegiatan yang menjurus kepada menaiknys gengsi. Pekerjaan bukan saja memper-
taruhkan hasil, melainkan mempertahankan gengsi dan harga diri di hadapan masyarakatnya. (5) tokoh-tokoh panutan khususnya Ulama berkharisma dan berwawasan luas sudah jarang dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Para ulama yang dijumpai di desa-desa, umumnya berwawasan berat sebelah dan hanya memusatkan perhatian dalam urusan ibadah mahdhah dan fiqih, dan cenderung mengabaikan aspek keduniawian, seperti pertumbuhan ekonomi, politik, sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya; (6) terjadinya krisis kepemimpinan dalam

masyarakat desa. Orang-orang yang cukup terpelajar enggan menjadi Keucik. Keucik dalam tradisi masyarakat Aceh adalah figur pekerja keras, sebagai pimpinan dan sekaligus sebagai pembantu masyarakat. Orang-orang yang cukup terpelajar, di samping tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan semua itu, maka ia pun melakukan kegiatan berdasarkan pemikiran rasional. Ada indikasi, cara seperti itu kurang mendapat tempat di masyarakat; (7) masyarakat Aceh terbentuk dari asal-usul dan aneka ragam suku bangsa. Keanekaragaman tersebut bermuara kepada sulitnya menjalin kebersamaan. Satu-satunya ikatan yang mempersatukan seluruh anggota masyarakat adalah ikatan keagamaan (Islam), yang mendapat dukungan penuh dari Pancasila dan UUD 1945. Ikatan agama menjadi simbol, identitas dan warna kehidupan masyarakat Aceh. Namun, pemahaman penduduk tentang ajaran agama (Islam) itu sendiri terbatas dan lebih dalam praktek ibadah mahdhah dan fiqih, belum mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Berkenaan dengan penerapan strategi: (1) belum ditemukan cara atau strategi yang paling efektif dalam menumbuhkan kesadaran, memotivasi, inisiatif, kreativitas, dan partisipasi seluruh anggota masyarakat agar terlibat dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan bagi pemecahan masalah/kebutuhan

yang dihadapinya; (2) penerapan strategi pasif-responsif yang diperkirakan mampu menumbuhkan aspirasi, motivasi, inisiatif, kreativitas dan partisipasi membangun dari dalam tumbuh dan berkembang. Kenyataannya, yang terjadi adalah sebaliknya -- semakin menebalnya sikap ketergantungan kepada pihak lain; (3) pelaksanaan kegiatan kurang kontekstual (tidak berorientasi kepada sosio-kultural dan pemanfaatan potensi yang ada), tetapi cenderung menerapkan mentah-mentah sesuatu yang dipandang berhasil di masyarakat lain; (4) intensitas, kontinuitas dan integralitas pembinaan kegiatan sangat rendah, sehingga efektivitas program berkurang; (5) pelaksanaan program CD khususnya pelatihan kader belum mengacu kepada praktek pembelajaran orang dewasa (PLS); (6) perlakuan proses birokrasi berkepanjangan; (7) ingin secepatnya selesai dan terkesan dipaksakan, sehingga kurang memperhatikan proses pemberdayaan masyarakat kepada pemecahan masalah mendasar; (8) tidak adanya pendelegasian tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk pelaksanaan kegiatan. Akibatnya, masing-masing bidang tidak terbina secara maksimal, baik karena keterbatasan kebijakan, tenaga, waktu, fasilitas, biaya dan sebagainya. Padahal, jika masing-masing perusahaan diberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk membina bidang-bidang tertentu sebagai prioritas bina-

annya, maka efektivitas kegiatan akan semakin tinggi.

B. Rekomendasi

1. Pengembangan Program CD

Rekomendasi yang diajukan di sini mengacu kepada penyempurnaan konsep pengembangan masyarakat desa model, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan program CD perusahaan industri besar di ZILS. Dengan demikian, pola pengembangan masyarakat desa yang disempurnakan ini juga dapat dilihat sebagai salah satu model pengembangan masyarakat desa partisipatoris yang bermuatan PLS. Model yang diajukan ini diperkirakan tidak hanya dapat diaplikasikan di desa-desa model, namun terbuka peluang untuk diaplikasikan pada situasi dan kondisi masyarakat atau kawasan industri lainnya. Walaupun model yang diajukan sangat kontekstual dengan situasi dan kondisi masyarakat desa model di ZILS.

Konsep pengembangan yang diajukan berkenaan dengan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan program pembangunan partisipatoris dalam konteks PLS.

a. Perencanaan

Perencanaan program dapat ditempuh dengan cara memadukan pendekatan top-down dan bottom-up. Dengan cara itu maka program-program yang direncanakan menjembatani permasalahan, kebutuhan dan kepentingan berbagai unsur

yang terlibat di dalam program. Pembentukan Kobangdem sebagai kelompok kecil perencana merupakan langkah awal yang ditempuh bagi pelaksanaan kegiatan partisipatoris, dalam proses pemberdayaan (Kindervatter, 1979). Hanya saja Kobangdem selama ini lebih diwakili oleh unsur birokrasi, sehingga program-program yang dilaksanakan lebih mengesankan penerapan pendekatan top-down atau kekuasaan. Kesan demikian juga dijumpai pada perencanaan program di tingkat desa, yang lebih diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat saja, sehingga permasalahan atau kebutuhan dan harapan yang menjadi dasar bagi perencanaan program cenderung pada permasalahan, kebutuhan dan harapan yang dirasakan para tokoh masyarakat saja. Belum dapat diklasifikasi sebagai penjabaran dari masalah, kebutuhan essential dan harapan yang dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai akibat, maka sense of belonging masyarakat terhadap program juga berkurang.

Agar perencanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan mengarah kepada proses perencanaan partisipatoris dalam konteks PLS, maka beberapa pemikiran berikut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

1. Masalah dan kebutuhan yang dijadikan dasar bagi perencanaan program, diangkat dari masalah/kebutuhan essential kelompok (lembaga dan masyarakat). Masalah dan kebutuhan tersebut sedapat mungkin merupakan pernyataan

individu atau kelompok sasaran itu sendiri. Keterlibatan Kobangdem dan tokoh-tokoh masyarakat lebih dibatasi sebagai penggerak masyarakat dalam mengungkapkan permasalahan dan kebutuhan yang mereka rasakan dan cita-citakan, tidak dengan sendirinya mampu mewakili kelompok secara keseluruhan. Dengan demikian, permasalahan atau kebutuhan yang menjadi landasan perencanaan adalah perpaduan antara masalah dan kebutuhan yang dirasakan anggota masyarakat, para tokoh, lembaga dan pemerintah.

Konsep pembangunan terpadu yang akan diterapkan di desa-desa model, tidak terbatas dalam lingkup simbolis-politis. Keterpaduan adalah pencerminan terwujudnya kebersamaan, baik dalam wawasan, persepsi, langkah, tujuan dan tindakan. Upaya penjalinan kebersamaan antar unsur terkait harus mendapatkan perhatian utama, dan itu dapat ditempuh melalui aktivitas pendidikan (PLS).

Sebab, semakin adanya keterpaduan dan kebersamaan dalam melihat masalah, kebutuhan dan kepentingan di antara unsur-unsur terlibat di dalam suatu program semakin besar sense of belonging kelompok terhadap program dan semakin termotivasi anggota kelompok di dalam kegiatan. Jika program tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil akan memberikan kontribusi yang semakin relevan dalam memecahkan masalah dan menjawab kebutuhan kelompok.

Permasalahan dan kebutuhan itu pun tidak terbatas pada masalah dan kebutuhan material saja tetapi mencakup masalah dan kebutuhan spiritual. Di kalangan masyarakat agamis (Islam), seperti halnya masyarakat di ZILS, pemecahan masalah dan kebutuhan material-duniawiyah tidak dapat dipisahkan dengan pemecahan masalah dan kebutuhan rohaniah-ukhrawiyah. Adanya kepercayaan (iman) bahwa hidup di dunia hanya sementara untuk membekali diri bagi kehidupan abadi di akhirat kelak, adalah cermin adanya masalah dan kebutuhan yang bersifat duniawiyah dan ukhrawiyah, yang harus dipecahkan dan dipenuhi. Oleh karena itu, orientasi perencanaan harus mencakup seluruh aspek kehidupan (duniawiyah-ukhrawiyah), bersifat integral, sebagaimana dirumuskan dalam GBHN. Semakin integralnya perencanaan program dilakukan semakin besar dan menyeluruh permasalahan dan kebutuhan kelompok terpecahkan, semakin terdorong keterlibatan anggota dan semakin kecil pula resistensi yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

2. Untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, inisiatif dan partisipasi seluruh anggota kelompok dalam perencanaan program, dapat ditempuh melalui penempatan dan pembinaan agen atau kader di tengah-tengah masyarakat. Agen atau kader hendaknya diutamakan yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi dan berwawasan luas, sehingga

dalam menggerakkan masyarakat ke dalam proses perencanaan mampu menggunakan berbagai pendekatan, sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Ia harus selalu berupaya membangkitkan kesadaran, inisiatif, motivasi, kreativitas, dan partisipasi anggota masyarakat dalam melihat, mengungkapkan dan melakukan sesuatu terhadap permasalahan yang dihadapinya.

Upaya melihat, mengungkapkan dan memecahkan permasalahan harus ditanamkan menjadi kebutuhan kelompok. Motivasi melihat, mengungkapkan, dan memecahkan permasalahan dikaitkan dengan pengabdian dan pengamalannya terhadap ajaran agama. Untuk itu, seorang agen atau kader harus mengadakan pendekatan dengan kelompok, terutama dengan orang-orang penting di dalam kelompok, sehingga ia menjadi bagian dari kelompok.

Peningkatan dan penyempurnaan juga perlu dilakukan di dalam lembaga, baik menyangkut kebijakan perusahaan di bidang CD maupun penempatan tenaga ahli di dalam divisi CD perusahaan, baik tenaga tetap atau tenaga konsultan. Dengan demikian, maka kualitas rencana pelaksanaan program CD yang dihasilkan memiliki bobot ilmiah yang tinggi, serta mampu menjembati berbagai kepentingan di dalam suatu program. Selain itu pelaksanaan kegiatan pun akan berkesinambungan.

3. Untuk menghadapi perubahan-perubahan pesat di masa

depan, seiring dengan proses industrialisasi dan globalisasi, maka yang menjadi titik sentral perencanaan program CD di ZILS harus mengarah kepada pembinaan kualitas dan sikap mental manusia. Hanya manusia berkualitaslah yang mampu bersaing dalam kehidupan global, tanpa meninggalkan jatidirinya, jatidiri masyarakatnya, dan jatidiri bangsanya.

Jika pihak Pemda (Kobangdem) dan perusahaan selama ini lebih banyak menyelenggarakan program CD yang menjurus kepada proyek-proyek monumental, seremonial dan gengsi, maka untuk menghadapi kehidupan global program-program yang direncanakan dan dilaksanakan perlu ditekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Rencana-rencana pengembangan pasca gas, yang sifatnya antisipatif, harus mampu dicetuskan. Jika tidak, maka tidak mustahil kondisi masyarakat akan kembali ke kondisi suram dan serba memprihatinkan, seperti kondisi sebelum proses industrialisasi. Bila situasi yang tidak diharapkan itu terjadi, akan menjadi malapetaka bagi kelangsungan hidup manusia, khususnya masyarakat di kawasan itu.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka potensi dan sikap mental yang dilandasi ajaran dan iman

islami harus semakin ditumbuhkembangkan, baik dijadikan sebagai landasan dasar pelaksanaan kegiatan maupun sebagai filter untuk menyaring berbagai dampak negatif yang mungkin timbul. Semakin besar potensi agama dimanfaatkan dan ditumbuhkembangkan menjadi potensi pembangunan, semakin kuat landasan dan semakin kokoh filter yang dibangun untuk menangkis dampak negatif pembangunan dan perkembangan zaman.

4. Perencanaan kegiatan harus dilakukan berkesinambungan, hasil pelaksanaan suatu program harus dijadikan sebagai landasan bagi perencanaan program berikutnya. Oleh karena itu, evaluasi kegiatan juga harus direncanakan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Melalui evaluasi itulah proses kegiatan, keberhasilan dan kelemahan sistem yang diterapkan dapat diungkapkan dan disempurnakan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi semakin efektif. Evaluasi dilakukan terhadap semua komponen sistem, mulai dari proses perencanaan sampai kepada dampak, serta dilaksanakan oleh semua unsur yang terlibat dalam sistem termasuk oleh peserta sendiri.
5. Program-program yang direncanakan lebih menekankan pada pengembangan potensi dan swadaya masyarakat. Pola pembinaan yang mengarah kepada pemberian ikan yang ditempuh selama ini bukan saja tidak mendukung pengembangan potensi-potensi yang ada, akan tetapi juga mempertebal

sikap ketergantungan masyarakat kepada pihak lain (khususnya terhadap perusahaan), bahkan juga melunturkan semangat swadaya dan kegotongroyongan masyarakat. Padahal konsep pengembangan program CD adalah memberikan kail. Bahkan dengan cara itu saja ternyata belum cukup, mereka juga harus diajarkan bagaimana caranya mengail, di mana harus mengail, kapan harus mengail, ikan apa yang akan dikail, dari mana ikan itu diperoleh, bagaimana memeliharanya, kemana akan dipasarkan, dan seterusnya.

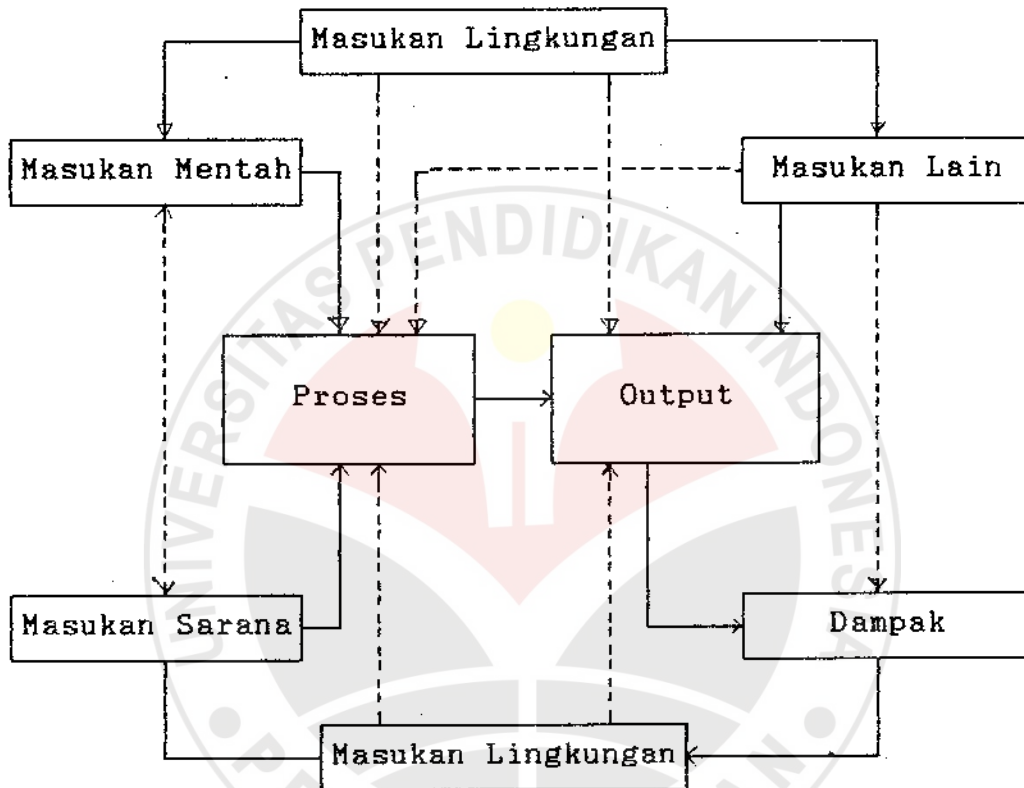
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas maka program-program yang direncanakan akan sangat memungkinkan dilaksanakan dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi dan swadaya serta kegotongroyongan masyarakat. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak terpisahkan dengan aktivitas PLS, baik sebagai bagian penting dari kegiatan yang harus dilakukan atau sebagai pendekatan dasar dalam menumbuhkan swadaya dan semangat kegotongroyongan. Semakin mengarah kegiatan pada swadaya dan kegotongroyongan masyarakat, semakin besar dan kuat dukungan terhadap program. Semakin berperan dan berfungsinya PLS dalam membangkitkan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat, semakin mendukung pengaktualisasian prinsip pembangunan partisipatoris dan semakin efektif program dalam mewujudkan tujuannya.

Agar prinsip-prinsip pembangunan partisipatoris teraktualisasi dengan baik dalam perencanaan program CD, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah: (1) menyiapkan pedoman dan prosedur perencanaan yang dapat diterima dan dimengerti oleh semua peserta atau unsur terkait; (2) mengupayakan keterlibatan seluruh anggota kelompok di dalam proses pengambilan keputusan sekaligus dalam pelaksanaan keputusan; (3) menyakinkan peserta bahwa partisipasi, kontribusi, peran dan tanggungjawabnya adalah penting dan menentukan bagi kelompok; (4) membantu kelompok dalam menemukan dan menentukan masalah yang dihadapi, dan berbuat sesuatu dalam membantu pemecahannya; (5) mengalokasikan peran, tugas dan tanggungjawab setiap peserta sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan yang berlaku di dalam kelompok; (6) permasalahan yang diangkat dan direncanakan ke dalam program merupakan hasil kesepakatan kelompok dan mendapat dukungan dari pemimpin formal dan informal; (7) untuk menjaga kontinuitas perencanaan maka kegiatan evaluasi harus dilaksanakan baik yang mengarah kepada proses, hasil dan dampak.

Dalam bentuk diagram, proses perencanaan program CD di ZILS yang dijiwai oleh prinsip-prinsip pembangunan partisipatoris berdasarkan sistem PLS, sebagai pengembangan dari sistem perencanaan PLS yang diajukan Sudjana (1991:32). Sistem perencanaan yang diajukan disini memper-

hitungkan semua karakteristik dari komponen sistem dalam konteks sosio-kultural kemasyarakatan di ZILS, yang secara fungsional dapat dilihat dalam gambar berikut.

HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTAR KOMPONEN SISTEM
BAGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA MODEL DI ZILS



Masukan mentah (*raw input*) sistem adalah individu, kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran program CD perusahaan industri besar di ZILS dengan segenap karakteristik internal dan eksternal yang dimilikinya. Karakteristik internal dimaksud adalah pengetahuan, sikap, perilaku, pengalaman, minat, motivasi, aspirasi, keahlian, keterbu-

kaan, etos kerja, masalah, kebutuhan dan harapan yang mencakup segenap aspek kehidupan. Karakteristik eksternal di antaranya status sosial-ekonomi, pendidikan yang dimiliki, biaya dan sarana belajar, adat-kebiasaan, nilai dan norma sosial, serta cara dan kebiasaan belajar.

Masukan sarana (*intrumental input*) mencakup keseluruhan sumber dan fasilitas yang dapat digunakan bagi penyelenggaraan kegiatan, baik yang berada di lingkungan masyarakat sendiri seperti tokoh-tokoh masyarakat, meunasah, mesjid, warung kopi, lembaga-lembaga sosial desa dan sebagainya, maupun sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan di lingkungan perusahaan seperti biaya, fasilitas, tenaga ahli (termasuk tenaga asing), sistem kerja, serta kemudahan-kemudahan yang dimiliki perusahaan lainnya, serta sumber-sumber lainnya yang mungkin dimobilisasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan melalui kerjasama yang baik. Ke dalam masukan sarana juga termasuk tujuan program yang menyentuh berbagai kepentingan; meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, menumbuhkan sense of belonging terhadap perusahaan, dan menjadi mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan; kurikulum dan materi pembinaan dan sebagainya; metode, media pembinaan dan pendekatan yang digunakan, dan lain-lain.

Masukan lingkungan (*environmental input*) mencakup kondisi geografis, kondisi demografis, aktivitas pendidik-

an, kehidupan ekonomi, politik, sosial-budaya dan keagamaan, keamanan dan berbagai potensi lingkungan dan kelembagaan lainnya yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program. Lingkungan yang dimaksudkan di sini dapat dilihat dalam lingkup lokal (masing-masing desa model), regional, nasional dan bahkan internasional.

Masukan lain (*other input*) mencakup kecenderungan-kecenderungan yang akan dihadapi di masa depan seperti peluang-peluang yang tercipta, tantangan yang harus dihadapi, perubahan orientasi kehidupan, pengaruh kehidupan global, upaya peningkatan produksi, pemasaran produk, dan strategi pengembangan lebih lanjut.

Masukan-masukan tersebut oleh lembaga perubahan diproses, dirumuskan dan dikaji secara mendalam, untuk merumuskan tujuan umum perubahan, menentukan sasaran dan tujuan program, menentukan langkah dan kegiatan yang ditempuh dalam mewujudkan target perubahan yang diinginkan. Pendekatan dan strategi yang bervariasi yang mendukung keterlibatan seluruh anggota kelompok dapat diterapkan, namun dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sesuai dengan sasaran yang dihadapi, sehingga program yang dilaksanakan menjadi semakin efektif serta mendukung pengaktualisasian prinsip pembangunan partisipatoris.

Output sistem, berupa perubahan-perubahan sikap, pengetahuan, pola pikir, keahlian, pola kerja dan sebagainya harus mengarah kepada peningkatan kualitas kehidupan individu dan kelompok. Dampak (*learning out come*) program diharapkan bermuara kepada: peningkatan taraf hidup anggota kelompok seperti peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, gizi, lingkungan hidup terciptanya pekerjaan alternatif dan sebagainya; terwujudnya masyarakat gemar belajar; dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat baik secara fisik-material maupun mental spiritual. Dampak program juga diharapkan berimbas kepada kehidupan yang lebih luas, pada aspek-aspek kehidupan yang belum mendapatkan pembinaan maupun terhadap individu dan kelompok di desa-desa model dan ZILS khususnya maupun masyarakat desa pada umumnya.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang ditempuh selama ini kurang memperhatikan minat, aspirasi, kebutuhan dan kemampuan peserta, baik dalam pengidentifikasian masalah/kebutuhan, perencanaan kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan. Pengorganisasian penduduk lebih mengarah kepada pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan bersama di bidang ekonomi, sebagai

upaya peningkatan pendapatan kelompok termasuk pengembangan koperasi di desa-desa model dapat dikatakan belum dilakukan. Kalaupun pembinaan terhadap usaha untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dilakukan, bukanlah dalam bentuk usaha bersama kelompok yang khusus dibentuk untuk itu, jadi sifatnya individual atau paling-paling dengan dukungan anggota keluarga.

Pengorganisasian seperti itu juga dalam penyelenggaraan pelatihan. Penseleksian dan pengelompokan peserta juga belum sepenuhnya berdasarkan minat, aspirasi, masalah, kebutuhan dan kemampuan peserta, khususnya dalam bidang kejuruan pertanian terpadu. Penseleksian peserta sangat formalistis. Pengelompokan peserta lebih kepada pemerataan dan pemenuhan jumlah peserta di masing-masing bidang kejuruan. Peserta mengikuti bidang-bidang kejuruan tertentu (khusus pertanian terpadu) terkesan karena keterpaksaan, untuk tidak mengkhianati pihak pengirimnya. Akibatnya, dampak dari kaderisasi tidak tercapai, bahkan banyak di antara mereka yang mencoba beralih profesi ke bidang-bidang pekerjaan di luar keahliannya atau kembali pada kondisi semula.

Untuk peningkatan efektivitas kegiatan di masa yang akan datang, maka pengorganisasian peserta perlu disesuaikan dengan permasalahan, minat, aspirasi, kebutuhan, potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Pengorga-

nisasian masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama di bidang ekonomi, dengan memperhitungkan aspek sosio-kultural dan potensi harus mendapat perhatian yang lebih besar. Dengan cara seperti itulah taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara bertahap dapat ditingkatkan. Semakin mengarah pengelompokan peserta kepada masalah, minat, kebutuhan dan harapan, semakin merasa memiliki terhadap kelompok, sehingga semakin terdorong anggota kelompok mewujudkan tujuan kelompok. Apalagi dampak dari kegiatan kelompok secara langsung dirasakan manfaatnya oleh anggota.

Adapun langkah-langkah kegiatan yang dapat ditempuh seperti berikut: (1) memahami tujuan dan kegiatan yang telah disusun dalam rencana; (2) menjabarkan kegiatan ke dalam rincian pekerjaan yang akan dilakukan bersama; (3) menentukan persyaratan ketenagaan, menetapkan peraturan, dan merekrut tenaga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan kelompok; dan (4) memadukan tenaga, sumber-sumber lain dan pekerjaan ke dalam organisasi yang sesuai untuk mencapai tujuan bersama.

c. Penggerakan

Efektivitas pelaksanaan program CD dipengaruhi oleh keterlibatan unsur-unsur terkait. Oleh karena itu, seorang agen harus berupaya menggerakkan seluruh anggota kelompok ke dalam pelaksanaan kegiatan. Menurut Hersey dan

Blanchard (1982), untuk mendorong keterlibatan seseorang di dalam suatu kegiatan dapat ditempuh melalui sentuhan kebutuhan (needs), keinginan (willingness), kekuatan dari dalam (drives), dan kata hati (Sudjana, 1992:114-117). Untuk itu konsep kesadaran (Illich, 1971; dan Freire, 1970), konsep kebutuhan berprestasi (McClelland, 1961; dan Maslow, 1970), konsep pemberdayaan (Kindervatter, 1979), konsep dinamika kelompok (Cartwright dan Zaltman, 1972), dan konsep andragogi (Knowless, 1970) dapat diterapkan melalui penyesuaian seperlunya, di dalam proses pembinaan kegiatan, serta dipandang masih relevan dengan karakteristik masyarakat di ZILS.

Untuk menggalang keterlibatan seluruh anggota kelompok atau unsur-unsur terkait dalam pelaksanaan program CD di ZILS, dapat ditempuh melalui penyelenggaraan program-program yang mempertaruhkan kepentingan, keinginan, kekuatan dan kata hati unsur-unsur terkait di dalam program. Bagi masyarakat yang melekat dengan nilai dan ajaran agama (Islam), seperti halnya masyarakat di ZILS, motivasi, kepentingan, keinginan, kekuatan dan kata hati dapat digerakkan dengan mempertautkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan nilai, pengamalan dan upaya mensyiarkan ajaran agama Islam itu sendiri. Untuk itu, seorang agen perubahan masyarakat di ZILS atau masyarakat Aceh pada umumnya diutamakan di samping mempunyai bekal keah-

lian tertentu, juga berkemampuan dalam bidang CD dan mempunyai pengetahuan agama yang cukup.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai agen untuk menggerakkan keterlibatan anggota kelompok, ia dapat memadukan keahliannya dengan teknik CD yang dilandasi oleh nilai dan upaya mensyiarkan ajaran agama. Semakin mampu seorang agen memadukan kemampuan teknik dengan nilai dan upaya mensyiarkan ajaran agama dalam suatu kegiatan akan semakin mudah menggerakkan keterlibatan anggota kelompok ke dalam kegiatan, dan besar pula kecenderungan bagi keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Sebaliknya, semakin jauh suatu program dengan nilai dan ajaran agama semakin sulit menggerakkan orang-orang ke dalam kegiatan.

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mendorong keterlibatan anggota kelompok dalam kegiatan, adalah: (1) menjelaskan tentang pentingnya keterlibatan semua anggota dalam pencapaian tujuan bersama; (2) memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota di dalam kelompok; (3) mengadakan pertemuan-pertemuan kelompok untuk menyampaikan, mende-ngarkan dan mendiskusikan berbagai permasalahan yang diha-dapi anggota dan cara-cara pemecahannya; (4) menjalin dan memelihara hubungan baik di dalam kelompok; (5) menghin-dari dan memperkecil resiko yang mungkin timbul dalam di dalam pelaksanaan kegiatan kelompok; dan (6) mempertautkan

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan pengamalan dan upaya mensyiarkan ajaran agama (Islam).

Fakta menunjukkan, bahwa penduduk tidak segan-segan berkorban pada kegiatan-kegiatan yang mempertaruhkan agama. Jika ajaran agama (Islam) dipertaruhkan, motivasi masyarakat dalam melakukan kegiatan berlipat ganda, sebab melaksanakan kegiatan itu tidak saja mengharapkan hasil untuk memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga memenuhi tuntutan pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Semakin mampu langkah-langkah tersebut diterapkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan di dalam suatu kelompok, semakin besar kecenderungan keterlibatan anggota di dalam kegiatan.

d. Pembinaan

Belum maksimalnya hasil yang dicapai dari aktivitas CD perusahaan industri besar di ZILS, berkaitan dengan kontinuitas dan intensitas pembinaan kegiatan yang dilakukan. Pembinaan kegiatan CD di desa model hanya dilakukan secara intensif selama agen di lapangan, di dalam pelatihan, dalam kegiatan pembinaan pegel dan koperasi. Selebihnya pembinaan kegiatan walaupun ada namun sangatlah insidental. Kontinuitas pembinaan yang dilakukan juga relatif sangat rendah. Akibatnya, pencapaian tujuan kegiatan juga relatif rendah. Bahkan dapat terjadi, bahwa dampak yang muncul dapat menyimpang dari tujuan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan, semisal semakin menebalnya tingkat keter-

gantungan masyarakat terhadap perusahaan.

Terjadinya pelaksanaan kegiatan yang tumpang tindih dan berulang-ulang, atau belum berfungsinya kegiatan kaderisasi yang dilakukan, antara lain disebabkan oleh intensitas dan kontinuitas pembinaan relatif sangat rendah. Jadi, semakin tinggi intensitas dan kontinuitas pembinaan dilakukan, semakin mengarahkan kegiatan pada pencapaian tujuan yang diharapkan dan semakin efektif kegiatan dalam mewujudkan perubahan.

Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan di masa-masa mendatang, maka intensitas dan kontinuitas pembinaan harus mendapat perhatian serius. Untuk itu, perluasan jaringan pembinaan, melalui pemanfaatan unsur-unsur terkait atau bahkan melalui upaya melipat gandakan peran dan fungsi yang dapat dimainkan tokoh-tokoh masyarakat harus dijadikan fokus perhatian. Melalui pembinaan berkesinambungan, maka pelaksanaan kegiatan yang tumpang tindih sehingga mengakibatkan terjadinya pemborosan dan ketidak-efektifan kegiatan dapat dikurangi. Pelaksanaan kegiatan yang tumpang-tindih dan berulang-ulang akan menimbulkan kebosanan, dan kebosanan membatasi keterlibatan.

e. Penilaian

Salah satu faktor penyebab berkurangnya efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan perubahan, disebabkan oleh tidak dilakukan penilaian kegiatan secara terencana.

Penilaian kegiatan terbatas pada kegiatan pelatihan, untuk tujuan penentuan berhasil atau gagal seorang peserta. Karenanya, penilaian lebih menyerupai apa yang diberlakukan di sekolah-sekolah, yang tekanannya pada hasil, bukan pada proses dan dampak. Dengan demikian, umpan balik yang sangat diperlukan bagi penyempurnaan program atau pengembangan program lebih lanjut tidak dapat dipenuhi. Semakin baik sistem penilaian direncanakan dan dilaksanakan, semakin banyak pula informasi mengenai proses, hasil dan dampak program yang dapat diperlakukan sebagai umpan balik kegiatan, dan semakin mendukung pengembangan program berkelanjutan dalam memecahkan masalah/kebutuhan masa kini dan masa mendatang.

Untuk menjaga efektivitas kegiatan, serta untuk pengembangan kegiatan berkesinambungan, maka pelaksanaan evaluasi sangat penting. Melalui evaluasi akan diketahui masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, hasil yang dapat dicapai, maupun dampak yang ditimbulkannya. Dengan cara demikian, penyelenggaraan program dapat disempurnakan, baik untuk meneruskan pelaksanaan program program tersebut maupun untuk pengembangan program lebih lanjut secara berkesinambungan.

Untuk memenuhi keperluan itu, penilaian tidak hanya dilakukan oleh lembaga dan nara sumber, penilaian juga dapat dilakukan oleh teman sejawat, unsur-unsur terkait,

dan oleh peserta sendiri. Penilaian tidak hanya menekankan pada hasil, melainkan proses dan dampak, baik terhadap peserta itu sendiri, lembaga maupun masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Adapun aspek-aspek yang harus dinilai mencakup: (1) persiapan program (kebutuhan, konsep program, perkiraan biaya, kelayakan pelaksanaan, dan proyeksi tentang tuntutan baru dan daya dukung program; (2) kemungkinan tindak lanjut, perluasan dan penghentian program (menyangkut kebutuhan selanjutnya, efektivitas pemenuhan kebutuhan, kemungkinan-kemungkinan efek sampingan program, perkiraan dampak positif penting yang dapat ditimbulkan, pembiayaan, persyaratan yang diperlukan dan daya dukung); (3) kemungkinan memodifikasi program (berkenaan dengan tujuan, isi, konteks program, kebijakan dan penggunaan tenaga); (4) temuan tentang dukungan program dari masyarakat, kekuatan politik, sumber biaya, dan profesi; (5) temuan tentang hambatan program dari masyarakat, kekuatan politik, sumber biaya, dan profesi; dan (6) temuan yang berkaitan dengan keilmuan dan teknologi yang mendasari program, seperti pendidikan, psikologi, fisiologi, sosial, ekonomi, dan metodologi penilaian.

Langkah-langkah penilaian program yang dapat ditempuh sebagai berikut.

- 1) Mengidentifikasi pihak pembuat keputusan yang menghen-

daki pelaksanaan kegiatan dan hasil penilaian program (baik perorangan maupun lembaga), untuk merundingkan mengenai informasi yang diinginkan, bentuk atau satuan kegiatan, kerjasama dengan organisasi, instansi dan program lainnya, komponen-komponen program, rekrutmen dan penempatan tenaga, cara penentuan kebijakan dan lembaga pengelola, pola umum pelaksanaan program, dan bantuan pelayanan lainnya yang disediakan program.

- 2) Mempelajari sumber-sumber tertulis yang berkenaan dengan penilaian program, untuk dijadikan bahan masukan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan konsep penilaian maupun untuk penyusunan langkah-langkah penilaian.
- 3) Menentukan komponen, dimensi, variabel, dan atribut yang akan dinilai (seperti masukan sarana, masukan mentah, masukan lingkungan, dan masukan lainnya, termasuk dampak program).
- 4) Merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus penilaian program sesuai dengan kebutuhan dan atau kesepakatan pengambil keputusan.
- 5) Memilih dan menetapkan metode penilaian program yang akan digunakan, disesuaikan dengan tujuan, ruang lingkup penilaian, dan faktor-faktor pendukung lainnya.
- 6) Menyusun instrumen penilaian, sesuai dengan tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan.

- 7) Menetapkan populasi dan sampel yang akan dijadikan sasaran penilaian.
- 8) Menyusun dan mengajukan usulan penilaian, mencakup latar belakang penilaian, tujuan penilaian, temuan ilmiah, metode dan teknik penilaian, alat penilaian, waktu penilaian, unsur penilai, dan pelaporan hasil.
- 9) Pelaksanaan penilaian, mencakup pengumpulan, pengolahan dan pelaporan.
- 10) Menilai hasil penilaian, untuk mengetahui tingkatan pencapaian tujuan evaluasi program.

f. Pengembangan

Pengembangan kegiatan adalah langkah awal bagi pengelolaan program berkelanjutan. Pengembangan program berkelanjutan didukung oleh sistem dan hasil penilaian program yang dilaksanakan sebelumnya. Keputusan dari suatu evaluasi dapat berupa tingkat keberhasilan atau kegagalan program, penghentian program, perbaikan program, penentuan pengaruh program, kelanjutan program, dan atau pengembangan program. Apabila keputusan yang diambil adalah perlu adanya peningkatan program maka kegiatan pengembangan merupakan suatu keharusan (Sudjana, 1992:261-262).

Pengembangan program CD khususnya di desa-desa model ternyata tidak dapat dipisahkan dengan upaya pendidikan, khususnya PLS, baik sebagai bagian penting dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan maupun sebagai pende-

katan dasar bagi pelaksanaan program-program CD. Terutama mengingat bahwa awal perubahan sosial terjadi dalam perubahan sikap dan prilaku positif individu terhadap program perubahan yang akan dilaksanakan. Semakin berperan dan berfungsinya PLS di dalam CD semakin mengarah kepada pembentukan sikap dan prilaku positif individu terhadap program perubahan, sehingga semakin efektif program dalam mencapai target perubahan. Semakin besar sikap dan prilaku positif individu dibutuhkan bagi perubahan, semakin besar peranan yang dapat dimainkan PLS sebagai pendekatan dasar bagi penyelenggaraan perubahan, dan semakin eksis PLS dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Apabila upaya pengembangan masyarakat desa model ditelusuri dalam konteks PLS, maka pengembangan program adalah sangat penting. Pertama, sesuai dengan azas pendidikan sepanjang hayat (*life long education*), dan prilaku belajar sepanjang hayat (*life long learning*), maka program PLS merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Suatu program yang telah selesai dilaksanakan, apabila dianggap penting, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan.

Kedua, dalam manajemen PLS, pengembangan program merupakan rangkaian kegiatan yang runtut. Manajemen ini berkembang seiring dengan laju pembangunan masyarakat,

pembangunan bangsa, dan tuntutan perkembangan baru dari masyarakat (Sudjana, 1992:262). Sementara pembangunan, dalam makna yang wajar dan luas, tidak mengenal berhenti, melainkan terus berjalan sesuai dengan dinamikanya. Kontinuitas dan dinamika pembangunan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan, permasalahan, sumber-sumber, kondisi lingkungan, pengalaman pembangunan, kebijaksanaan, perubahan tujuan, dan strategi pembangunan itu sendiri. Adanya pentahapan pelaksanaan pembangunan tercermin dalam rencana pembangunan jangka panjang bangsa Indonesia, baik untuk jangka waktu 25 tahun, lima tahun, dan untuk satu tahun.

Pendekatan yang dipandang tepat bagi pengembangan program pembinaan masyarakat desa model adalah pendekatan partisipatoris. Pendekatan partisipatoris memberi peluang kepada semua unsur terlibat untuk mengembangkan inisiatif dan ikut secara aktif dalam program. Pendekatan partisipatoris akan sangat efektif di dalam pengembangan program apabila: (1) terjalinnya hubungan akrab antar partisipan; (2) tersedianya informasi yang lengkap sebagai hasil penilaian program; (3) adanya keinginan dan kepentingan yang sama di antara para partisipan; dan (4) adanya manfaat program yang dirasakan partisipan.

Adapun strategi yang dipandang tepat diterapkan dalam pengembangan program pembinaan masyarakat desa model

adalah melalui aplikasi manajemen strategis (strategic management). Melalui manajemen strategis memungkinkan pengembangan program yang ikut memperhitungkan semua aspek dari program. Ikut memperhitungkan permasalahan dan kebutuhan, serta informasi yang diperoleh melalui pengkajian lingkungan (environmental scanning), dipadukan dengan perencanaan jangka panjang (the long-range planning). Dengan demikian, program-program pengembangan masyarakat sejalan dengan upaya pemecahan permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Penerapan manajemen strategis memungkinkan pengembangan program pembinaan berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan partisipatoris, karena ia ikut memperhitungkan semua kecenderungan yang berkembang di luar lembaga perubahan.

Untuk menerapkan perencanaan strategis dalam upaya pengembangan masyarakat desa model, pihak perusahaan industri besar di ZILS dapat menempuh langkah-langkah berikut. (1) Mengidentifikasi dan menyusun kecenderungan berbagai isu yang berkembang di masyarakat atau di luar lembaga perubahan. (2) Menganalisis setiap isu dan kecenderungan, mengevaluasi dan mengurutkannya. (3) Meramalkan kecenderungan dan isu yang sangat diharapkan terjadi di masa depan oleh lembaga perubahan. (4) Memantau setiap isu dan kecenderungan yang dianggap penting, untuk mengetahui relevansinya atau penyimpangannya terhadap hasil

peramalan yang telah disusun semula. Pemantauan ini penting untuk mengidentifikasi hal-hal baru sebagai informasi tambahan, bagi upaya pengkajian lingkungan selanjutnya.

2. Pelaksanaan Penelitian Lebih Lanjut

Disadari sepenuhnya, bahwa penelitian ini mempunyai berbagai keterbatasan, baik berkenaan dengan jangkauan wilayah, metode dan teknik penelitian yang digunakan, maupun teknik analisis data yang dipakai. Oleh karena itu, untuk menjadikannya sebagai konsep dipandang masih terlalu dini. Dengan kata lain, terbuka peluang seluas-luasnya untuk pelaksanaan penelitian lebih lanjut, baik berkenaan dengan permasalahan dan lokasi yang sama maupun di kawasan lainnya, atau menguji proposisi-proposisi yang diajukan terutama dalam bentuk action research.

Penelitian ini lebih ditinjau dari sudut pandang PLS, sehingga warna penelitian termasuk analisisnya juga lebih didasarkan kepada konsep PLS. Untuk memperkaya hasil yang telah dicapai menjadi suatu konsep, atau untuk keperluan generalisasi maka dirasakan perlu lebih diperkaya dari sudut pandang berbagai disiplin keilmuan lainnya.

Penelitian inipun baru dilakukan di suatu kawasan industri (ZILS). Itupun terbatas di lingkungan tiga perusahaan industri besar (PT. Arun, PT. Pupuk Asean, dan PT. Pupuk Iskandar Muda). Terdapat sejumlah perusahaan indus-

tri lainnya di kawasan itu yang belum terpilih sebagai subyek penelitian. Begitu pula unit analisis wilayah terbatas pada tiga desa model, dari sejumlah desa model. Belum lagi mencakup seluruh masyarakat dan desa sekitar, yang mungkin saja mempunyai karakteristik berbeda. Oleh karena itu, untuk lebih memperkaya penelitian masih sangat terbuka bagi pelaksanaan penelitian berkenaan dengan masalah yang sama atau hampir bersamaan, dengan pemilihan unit analisis yang lebih luas. Mencakup semua perusahaan industri besar, semua desa model, bahkan desa dan masyarakat sekitar di luar desa model. Penelitian yang sama juga dapat dilakukan di berbagai kawasan industri nasional dan multinasional lainnya.

Menyangkut metode "deskriptif-analitis" dan pendekatan "kualitatif" yang digunakan dalam penelitian, juga mempunyai jangkauan yang terbatas. Hasil penelitian belum dapat dijadikan generalisasi, bersifat kontekstual, walau tidak tertutup kemungkinan akan keterpakaiannya dalam lingkup yang lebih luas, dalam lingkup yang mempunyai karakteristik yang sama atau hampir sama dengan daerah penelitian. Masih terlalu dini untuk mengklasifikasi bahwa hasil penelitian ini secara langsung dapat diterapkan di dalam semua situasi. Perkembangan kehidupan manusia yang berlangsung dengan pesat, berdampak terhadap terjadinya perubahan yang pesat pula. Apa yang hari ini dipandang

tepat, mungkin besok atau lusa sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, hasil yang dicapai penelitian ini baru dapat dikatakan studi awal bagi studi-studi selanjutnya. Hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan tindakan nyata, dalam bentuk riset tindakan (*action research*).

Riset tindakan dipandang perlu sebagai ajang pengujian tingkat keterpakaian konsep (proposisi) yang diajukan secara kontekstual. Kegiatan penelitian tersebut dapat berlangsung bersamaan dengan kegiatan pengabdian masyarakat, atau dalam bentuk pilot project, baik melalui keterlibatan langsung peneliti ataupun ia bertindak sebagai konsultan bagi pelaksanaan riset tindakan dimaksud. Riset tindakan, dalam bentuk pilot project dapat dipadukan dengan upaya pengentasan kemiskinan yang sedang menjadi fokus pembicaraan, yaitu pengentasan kemiskinan melalui pembinaan desa binaan (baik dilakukan oleh perusahaan industri besar (BUMN) maupun lembaga-lembaga lainnya). Untuk itu, maka penyempurnaan internal dan eksternal kelembagaan bagi penyelenggaraan program CD yang semakin efektif perlu dipertimbangkan dengan seksama.